

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Free Trade Zone atau Kawasan Perdagangan Bebas merupakan pengembangan konsep *Special Economic Zone* (SEZ), dimana SEZ atau kawasan ekonomi khusus sebagai sebuah terminologi makro untuk kawasan yang ditetapkan untuk menyediakan lingkungan yang secara internasional kompetitif serta bebas dari berbagai hambatan berusaha dalam rangka memacu peningkatan ekspor nasional (Muzwardi, 2017). Free Trade Zone adalah wilayah dimana ada beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan dan mempermudah urusan birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing (Rade, 2014). Penggunaan konsep *Free Trade Zone* merupakan pengembangan dari SEZ yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah usaha pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan potensi yang ada (Muzwardi, 2017).

Menurut Torres A. Raul tujuan pengadaaan kawasan perdagangan bebas ialah untuk memberikan kemudahan di kawasan bebas dengan menyiapkan keuntungan-keuntungan dan pengelolaan perusahaan di dalam kawasan tersebut (dalam Muzwardy, 2017). Dengan tujuan penerapan Free Trade Zone tersebut, maka fungsi pelaksanaannya ialah untuk memberikan kesempatan bagi area domestik atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara luar dalam rangka mempercepat perkembangan ekonomi domestik dan negara.

Indonesia mempunyai empat kawasan *Free Trade Zone* yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Keempat kawasan ini dibentuk atas pertimbangan pentingnya pengembangan wilayah regional untuk mendorong lalu lintas perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pariwisata, dan menarik penanaman modal dari dalam dan luar negeri (Pradhipta, 2016). Penetapan kawasan perdagangan bebas tersebut diharapkan mampu memberikan peningkatan terhadap perekonomian di Indonesia.

Kawasan *Free Trade Zone* Batam, Bintan, dan Karimun merupakan kawasan FTZ yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat malaka sampai dengan laut (Natuna) cina selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapore sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia (Bappeda Kepri, 2016). Peran provinsi kepulauan Riau sebagai wilayah lalu lintas perdagangan dunia memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 dapat memperbesar peluang bagi wilayah FTZ yaitu Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) untuk meningkatkan hubungan perdagangan internasional.

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun diperkuat secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Penetapan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas karena merupakan kawasan strategis nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting secara nasional terhadap ekonomi nasional (Muzwardi, 2017). Penetapan ketiga Kawasan BBK sebagai kawasan ekonomi khusus didukung dengan letak wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura sehingga mempunyai peluang besar dan sangat efektif dalam melakukan hubungan dan aktivitas perdagangan internasional.

Perumusan BBK sebagai kawasan *Free Trade Zone* karena kawasan ini mempunyai potensi daya saing yang besar sehingga dapat dimanfaatkan. Potensi yang dimiliki dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, pariwisata, dan berbagai potensi lainnya yang dapat menunjang setiap kawasan untuk mampu menarik negara luar terutama para investor agar mau berinvestasi dikawasan tersebut (Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2016). Untuk itu selain potensi yang dimiliki, kawasan BBK diharapkan mampu berdaya saing untuk menarik investor dengan melakukan pengembangan KPBPB terutama dari segi infrastruktur.

Mengembangkan kawasan perusahaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun (FTZ Karimun), adalah sebuah tantangan bagi Badan Perusahaan

Karimun (BPKPBPB) untuk dapat mengambil kebijakan strategis memilih *the most potential income* untuk menggerakkan perekonomian kawasan, dan menarik investasi asing masuk (Renstra BPKPBPB Karimun 2013-2017). Implementasi peran Badan Pengusahaan (BPKPBPB) di Karimun masih mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan negara lain dimana dibuktikan dengan masih kurangnya infrastruktur yang jauh dari standar kelayakan (Renstra BPKPBPB Karimun 2013-2017).

Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor sehingga kesiapan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur sangat penting untuk membangun wilayah FTZ seperti penyediaan sumber air, pelabuhan dan bandar udara, bangunan, jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta infrastruktur pendukung lainnya. Infrastruktur merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara maupun kota (Ikhwan, 2018). Mengingat salah satu tugas dari Badan Pengusahaan ialah sebagai Pembangun dimana infrastruktur adalah bagian dari pelaksanaan pembangunan, membuktikan bahwa kinerja BPKPBPB Karimun masih belum mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan didalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi Badan pengusahaan Karimun dalam kinerjanya ialah minimnya keahlian dalam mengelola investasi yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia dimana personil Badan Pengusahaan Karimun masih merupakan pegawai Pemda yang diperbantukan di BP Karimun dan masih rangkap jabatan sehingga selain masih berorientasi birokrasi juga tidak fokus pada tugas-tugas di BP Karimun (Renstra BPKPBPB Karimun 2013-2017). Ketidak

fokusan organisasi dalam menjalankan tugasnya akan menyebabkan penurunan kinerja yang akan berdampak pada output yang dihasilkan sehingga tidak memenuhi standar sebagaimana yang diharapkan.

Kekalahan BPKPBPB Karimun terhadap kinerja yang dilaksanakan juga terdapat pada kemampuan menarik daya tarik investor asing ke kawasan bebas Karimun. Pada tahun 2015 jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di Kabupaten Karimun hanya berjumlah 20 perusahaan, jumlah ini sangat jauh berada dibawah Kabupaten Bintan dengan jumlah PMA sebanyak 158 perusahaan dan Batam sebanyak 63 perusahaan pada tahun yang sama. Kurangnya keahlian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dalam menarik investasi menyebabkan Karimun menjadi kawasan yang paling tertinggal dibandingkan dengan kawasan Batam dan Bintan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PMA Kawasan BBK Tahun 2015**

Nama Kawasan	Jumlah PMA (perusahaan)
Batam	63
Bintan	158
Karimun	20

*Sumber: BP Batam, BP Bintan, BP Karimun, 2015*

Masalah lain yang dihadapi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mengenai kinerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Karimun ialah dari segi pengelolaan pariwisata. Ketertinggalan pengelolaan pariwisata di kawasan Karimun dibuktikan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung di kawasan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (2018) jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke kawasan Karimun terus

mengalami penurunan sejak tahun 2015. Selain mengalami penurunan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Karimun merupakan jumlah terkecil jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan di kawasan Batam dan Bintan.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2015-2017**

<b>Nama kawasan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Karimun	96.666	89.107	84.288
Bintan	304.010	305.404	368.587
Bintan	1.545.818	1.432.472	1.504.275

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kepri, 2018*

Tujuan penetapan kawasan perdagangan bebas adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Dalam hal ini, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai wewenang dalam pengelolaan kawasan untuk mencapai tujuan pembentukan kawasan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, sejak tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di wilayah FTZ terus mengalami penurunan dengan meningkatnya persentase penduduk miskin di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (2018), persentase penduduk miskin di kepulauan riau sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan dengan persentase terakhir sebesar 6,20%. Peningkatan persentase angka kemiskinan juga dialami oleh ketiga kawasan FTZ yaitu Batam dengan persentase 4,81%, disusul Bintan dengan persentase kemiskinan sebesar 6,01%, dan Karimun sebesar 7,41%.

**Tabel 1.3**  
**Persentase Penduduk Miskin Kawasan BBK Tahun 2016-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Batam</b>	<b>Bintan</b>	<b>Karimun</b>
2016	4,68%	6,43%	6,77%
2017	4,81%	6,01%	7,41%

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kepri, 2018*

Permasalahan ekonomi di Karimun juga ditandai dengan penurunan indeks pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik Karimun (2018) sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Hal yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi di Karimun dikarenakan kondisi dimana salah satu perusahaan terbesar di Karimun melakukan pemberhentian hubungan kerja terhadap belasan ribu karyawan karena tidak adanya pesanan proyek yang diterima oleh perusahaan tersebut (Yudha, 2018). Dengan adanya pengurangan tenaga kerja menyebabkan jumlah pengangguran di Kabupaten Karimun meningkat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kawasan ini mengalami penurunan yang signifikan.

**Tabel 1.4**  
**Indeks Pertumbuhan Ekonomi Karimun Tahun 2012-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>
2012	7,24%
2013	7,09%
2014	6,87%
2015	6,54%
2016	6,17%
2017	5,42%

*Sumber: Badan Pusat Statistik Karimun, 2018*

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas menunjukkan bahwa peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKPBPB) Karimun untuk bersaing dalam meningkatkan perekonomian kawasan Karimun masih

belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja dari Badan Pengusahaan di kawasan Karimun untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah dalam mengimplementasikan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Badan Pengusahaan Karimun tersebut menjadi perhatian menarik bagi saya untuk melakukan penelitian terkait evaluasi kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Karimun. Adapun teori yang akan digunakan untuk mengukur evaluasi kinerja BPKBPB Karimun ialah menggunakan teori Dwiyanto berdasarkan indikator produktivitas, kualitas kinerja, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Karimun?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Karimun?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Karimun.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas dalam meningkatkan perekonomian di Karimun.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis
  - a. Sebagai masukan bagi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dalam upaya peningkatan kinerja organisasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  - b. Sebagai masukan bagi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dalam mengatasi masalah kinerja organisasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka, penelitian ini diawali dengan melihat penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan guna untuk mencari perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang akan dilaksanakan dan penelitian yang sudah ada.

**Tabel 1.5**  
**Tinjauan Pustaka**

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Temuan</b>
1	Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening antara Kompetensi Pegawai dan Budaya Kerja terhadap Kepuasan Mitra di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam	(Gunandi, Irawan, Ratnasari, & Wibisono, 2015)	Kompetensi karyawan, Budaya Kerja, Kualitas Layanan, Pelayanan Publik	Kuantitatif Deskriptif	Kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan akan dapat tercapai apabila pegawai memiliki kompetensi yang baik. Budaya kerja berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, budaya kerja yang baik memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
2	<i>The Analysis of Network Governance in the Investment Development of Free Trade Zone and Free Port Batam</i>	(Muzwardi, 2015)	Koordinasi, Investasi, Network Governance	Kualitatif Deskriptif	Koordinasi antar organisasi tingkat provinsi, kabupaten dan kota masih belum optimal. Hubungan koordinasi secara horizontal maupun secara vertical belum terjalin secara optimal
3	<i>Free Trade Zone Sebagai salah satu</i>	(Kurniawan, 2017)	Kawasan Perdagangan	Kualitatif	Pelaksanaan Free Trade Zone di Batam dari segi pengelolaannya bertanggung

	Wujud Implementasi Konsep Desentralisasi		Bebas, Otonomi Daerah, Desentralisasi Asimetris		jawab secara langsung kepada presiden melalui dewan kawasan yang menunjukkan bahwa adanya campur tangan pihak pusat dalam menjalankan kebijakan Free Trade Zone. Namun hal ini bukan berarti bahwa pelaksanaan FTZ merupakan pelanggaran dari pelaksanaan Desentralisasi yang bersifat khusus maupun istimewa
4	Implikasi <i>Free Trade Zone</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	(Yealta, 2015)	Pertumbuhan Ekonomi, Implikasi	Kualitatif	Dari aspek positif manfaat perdagangan bebas yang dilakukan ialah terjadinya peningkatan nilai ekspor, meningkatnya investasi langsung dan portofolio investment serta dapat menciptakan suatu keunggulan komparatif bagi ekonomi domestik. Dari segi negative munculnya persoalan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan KPBBP
5	Urgensi Otonomi Khusus Batam dikaitkan dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015	(Murti, 2015)	Otonomi Khusus, Kewenangan	Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan	Melalui pembentukan otonomi khusus Batam dapat menyelesaikan persoalan tumpang tindih kewenangan pemerintah Batam. Urgensi Otonomi khusus Batam juga berperan sebagai solusi dalam pembangunan dan pengembangan Kota Batam agar dapat berkembang seperti Singapura
6	Pengaruh Implementasi <i>Special Economic</i>	(Puspita, 2016)	Implementasi, <i>Special Economic</i>	Kualitatif Deskriptif	Terjadi kemajuan dari segi sarana dan prasarana bidang perhubungan darat, laut maupun udara yang akan

	Zone Batam Bintan Karimun terhadap Peningkatan Industri Pariwisata di Kabupaten Bintan pada tahun 2012- 2014		Zone , Pariwisata		memberikan dampak terhadap percepatan pengembangan dan pembangunan kawasan Bintan. Pengaruh SEZ juga berimplikasi terhadap perkembangan investasi asing di Bintan yang mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah Bintan
7	Dinamika Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam	(Anwar M.Si & Yanti, 2014)	Pertumbuhan Ekonomi, <i>Free Trade Zone</i>	Kualitatif Deskriptif	Melakukan koordinasi antara lembaga terkait dalam mengembangkan kawasan FTZ seperti membangun infrastruktur.infrastruktur
8	Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Hambatan Free Trade Zone di Batam (Studi Kasus : Hutan Lindung)	(Azzahra, 2015)	Kebijakan Publik, Hutan Lindung, <i>Free Trade Zone</i>	Kualitatif	Terhambatnya perkembangan FTZ di Batam di sebabkan oleh dua faktor yaitu tata kelola yang belum maksimal serta tumpang tindihnya kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dengan pemerintah Batam sendiri.
9	Analisis kinerja Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Mengatasi Kemacetan Lalu	(Maulana, 2016)	Kinerja organisasi, kemacetan lalu lintas ( <i>Problem</i>	Kualitatif deskriptif	Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan teori Dwiyanto yang terdiri dari 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan

	Lintas Tahun 2012-2015		<i>Solved)</i>		akuntabilitas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan sudah cukup baik dalam mengatasi kemacetan lalu lintas Kota Yogyakarta, namun langkah yang dilakukan hanya bersifat sementara waktu untuk itu perlu dilakukan langkah strategis untuk mengatasi masalah kemacetan Kota Yogyakarta yang semakin serius.
10	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah tahun 2016	(Ikhwan, 2018)	Kinerja, Pembangunan Infrastruktur	Kualitatif deskriptif	Analisis kinerja dilakukan dengan melihat indikator evaluasi kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Adapun kinerja yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dimana terjadi peningkatan pembangunan jalan yang semakin baik setiap tahun.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan saya lakukan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi kinerja Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang merupakan badan pengelola kawasan *Free Trade Zone* sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perdagangan bebas khususnya di Kabupaten Karimun. Dengan fokus kepada produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sebagai indikator pengukuran kinerja. Penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

## **1.6 Kerangka Dasar Teori**

### **1.6.1. Evaluasi Kinerja**

#### **A. Evaluasi**

Evaluasi adalah proses untuk pembuatan standar, pengumpulan data, penganalisaan, penyimpulan, dan pembuatan tindakan penyesuaian untuk mencapai tujuan organisasi (Kirana dan Ratnasari, 2017). Selanjutnya, pengertian evaluasi diartikan sebagai penilaian komprehensif terhadap seluruh proses dan konteks kebijakan (Nugroho, 2015). Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir periode. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kinerja dan perbaikan untuk kinerja pada periode selanjutnya.

Definisi evaluasi menurut Bryan dan White (1987) adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga

mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana (Oktaviani, 2017). Sedangkan menurut William N. Dunn (2003) pengertian evaluasi diartikan sebagai berikut :

*“Secara umum istilah evaluasi dapat dimakan dengan penafsiran (appraisal). Pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”* (Dunn dalam Zaenuri, 2015).

Menurut Sudarwin Danim dalam Zaenuri (2015) definisi penilaian (evaluating) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam defisnisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai

Berdasarkan pernyataan Sudarwin tersebut berarti bahwa evaluasi merupakan suatu perbandingan atau tolak ukur antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang didapatkan dalam suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu.

Dengan adanya penilaian atau evaluasi tersebut dapat diketahui apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan target atau tidak mencapai target sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut oleh organisasi yang bersangkutan. Proses evaluasi mempunyai fungsi diantaranya:

1. Memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran, dan target tertentu.
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain.

## B. Kinerja

Menurut Mohamad Mahsum (dalam Mutyarin, 2014) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya (Mutyarin, 2014). Dwiyanto menjelaskan Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi untuk memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa (dalam Mutyarin, 2014).

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto (2008) yaitu sebagai berikut:

### 1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas kemudian dikembangkan oleh *General Accounting Office* (GAO) dimana ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator yang penting.

## 2. Kualitas layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

## 3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

## 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Pendapat lain mengenai evaluasi kinerja juga dijelaskan oleh Kumorotomo (dalam Dwiyanto, 2008) yang menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain:

### 1. Efisiensi

Efisiensi menyangkut tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.

### 2. Efektivitas

Apakah tujuan didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

### 3. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan dan keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

### 4. Daya Tanggap

Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Pengukuran kinerja organisasi juga dijelaskan oleh Salim dan Woodward (dalam Dwiyanto, 2008) yang dilihat berdasarkan pertimbangan berikut:

#### 1. Ekonomi

Aspek ekonomi dalam kinerja diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik.

## 2. Efisiensi

Efisiensi kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan terbaik/proporsional antara input pelayanan dengan output pelayanan.

## 3. Efektivitas

Efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan.

## 4. Persamaan pelayanan

Prinsip keadilan dalam memberikan pelayanan publik juga dilihat sebagai ukuran untuk menilai seberapa jauh suatu bentuk pelayanan telah memberikan aspek-aspek keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.

### 1.6.2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya selama periode tertentu (Pramudya, 2015). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Pramudya, 2015). Pendapatan nasional berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dimana semakin tinggi pendapatan nasional berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Arsyad (dalam Pramudya, 2015), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan

Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Arsyad (dalam Pramudya, 2015) Pertumbuhan ekonomi terdiri dari enam ciri yaitu (1) tingkat pertumbuhan output perkapita dan tambahan penduduk yang tinggi, (2) tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja, (3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi, (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, (5) adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai pemasaran dan sumber bahan baku, (6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi (Bari, 2017) yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto/Produk domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

2. Produk Domestik Bruto Per Kapita

Produk Domestik Bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk.

Menurut Samualeson (dalam Pramudya, 2015) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas standar yang dimiliki oleh tenaga kerja berupa pengetahuan, keterampilan, dan disiplin angkatan kerja merupakan unsur terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya tenaga kerja yang kompeten barang-barang modal yang tersedia akan dapat digunakan secara efektif (Pramudya, 2015).

2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam diantaranya tanah yang baik untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air, serta bahan-bahan mineral. Beberapa negara telah mengalami pertumbuhan terutama berdasarkan landasan sumberdaya yang sangat besar dengan output besar dalam bidang pertanian, perikanan, dan perhutanan (Pramudya, 2015).

3. Pembentukan Modal

Negara-negara yang tumbuh pesat cenderung berinvestasi sangat besar dalam barang modal baru. Pada negara-negara dengan pertumbuhan paling pesat 10-20% output akan masuk dalam pembentukan modal bersih (Pramudya, 2015).

4. Perubahan Teknologi dan Inovasi

Majunya teknologi menjadi unsur vital ke empat dalam pertumbuhan standar hidup yang pesat. Dewasa ini, terjadi ledakan-ledakan

teknologi baru, khususnya dalam informasi komputasi, komunikasi, dan sains kehidupan (Pramudya, 2015).

### **1.7 Definisi Konseptual**

1. Evaluasi kinerja adalah penilaian dan pengukuran hasil pekerjaan yang telah dicapai dengan hasil yang diharapkan suatu organisasi untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya berdasarkan tingkat produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas.
2. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kondisi perekonomian suatu negara kearah yang lebih baik berdasarkan peningkatan pendapatan negara.

### **1.8 Definisi Operasional**

Untuk mengevaluasi kinerja dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun, maka perlu adanya indikator-indikator yang digunakan sesuai dengan indikator evaluasi kinerja oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (BPKPBB) menurut teori Dwiyanto, antara lain:

1. Produktivitas
  - a. Cara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun mencapai hasil berdasarkan tujuan yang ditetapkan di Rencana Strategis.

- b. Perbandingan antara program yang ditetapkan di rencana strategis dengan hasil yang dicapai oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
- 2. Kualitas Layanan
  - a. Perilaku pegawai BPKPBPB Karimun dalam melayani masyarakat yang meliputi kesopanan, keramahan, kejujuran, dan kedisiplinan.
  - b. Bentuk pelayanan BPKPBPB Karimun meliputi pelaksanaan perijinan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan pariwisata yang tepat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- 3. Responsivitas
  - a. Sikap BPKPBPB Karimun dalam merespon keluhan dari masyarakat atau pengguna jasa layanan terhadap kegiatan pengembangan kawasan perdagangan bebas meliputi membiarkan atau menjawab keluhan, menjawab keluhan dan memberikan rekomendasi, menjawab keluhan dan meneruskan dengan pertanyaan.
  - b. Daya kemampuan BPKPBPB Karimun dalam memberikan solusi terhadap keluhan masyarakat yang meliputi kecepatan pemberian solusi dan kecermatan pemberian solusi.
- 4. Responsibilitas
  - a. Pencapaian program dan kegiatan BPKPBPB Karimun yang sesuai dengan visi dan misi.
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan BPKPBPB Karimun sesuai dengan prinsip administrasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

## 5. Akuntabilitas

- a. Proses BPKPBPB Karimun melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap tahun.
- b. Transparansi BPKPBPB Karimun dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi adanya informasi pelayanan yang mudah diakses, adanya publikasi proses kegiatan dan detail keuangan, dan adanya website organisasi.

## **1.9 Metode Penelitian**

### 1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis evaluasi kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun ialah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian dimana meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dalam sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Hartadi, 2017). Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nasir dan Muhammad dalam Hartadi, 2017). Pemilihan jenis penelitian secara deskriptif kualitatif yaitu dimana obyek yang akan diteliti adalah pegawai organisasi dimana pemikiran atau hasil penelitian bersifat

dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud di dalam penelitian deskripsi kualitatif.

#### 1.9.2. Unit Analisis Penelitian

Unit analisa merupakan satuan yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian yang berkaitan dengan sesuatu yang akan diteliti. Unit analisa di dalam penelitian ini adalah organisasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagai organisasi yang mengelola kawasan FTZ, PT Trimegah perkasa Utama, PT Riau Alam Indonesia sebagai perusahaan yang beroperasi di kawasan FTZ Karimun, Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Karimun sebagai dinas terkait yang berhubungan dengan penerapan FTZ. Penentuan unit analisis ini berdasarkan pertimbangan obyektif untuk mendeskripsikan penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Karimun.

**Tabel 1.6**  
**Unit Analisa Penelitian**

<b>Unit analisa</b>	<b>Jumlah responden</b>
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	3
Dinas Pariwisata Seni dan Budaya	1
Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu	1
PT Tri Megah Perkasa Utama	1
PT Riau Alam Indonesia	1
<b>Total</b>	<b>7</b>

### 1.9.3. Jenis Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Sakir, 2013) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data yang digunakan didalam pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari obyek yang berhubungan langsung dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Data primer dalam penelitian ini adalah mengenai kinerja BPKPBPB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun yang diambil melalui proses wawancara langsung kepada unit analisa penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Karimun yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari dokumen-dokumen, arsip, atau literatur terdahulu untuk memaksimalkan pencarian informasi atau data dalam penelitian. Adapun data sekunder di dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.7**  
**Data Sekunder Penelitian**

Nama Data	Sumber Data
Data investasi Karimun 2015-2017	Badan Pusat Statistik Karimun
Data pertumbuhan ekonomi Karimun	Badan Pusat Statistik Karimun
Rencana strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
Rencana kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
LAKIP Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
Data PMA dan PMDN Karimun	Badan Pusat Statistik Karimun

#### 1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi yang digunakan didalam proses pengumpulan data atau informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningat dalam Hartadi, 2017). Jenis wawancara yang digunakan didalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan pedoman umum yang telah disiapkan sesuai dengan tema penelitian. Di dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada obyek penelitian yang berjumlah 7

informan yang terdiri dari 3 anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun, 1 orang pimpinan PT Tri Megah Perkasa Utama, dan 1 orang Pimpinan PT Riau Alam Indonesia, 2 orang dari Dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Karimun dan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Karimun.

Pemilihan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai narasumber penelitian karena mempunyai kompetensi dan pengetahuan terkait pertanyaan yang akan ditanyakan didalam proses wawancara. Selanjutnya pemilihan PT Trimegah Perkasa Utama dan PT Riau Alam Indonesia sebagai narasumber penelitian karena merupakan perusahaan yang mendapatkan layanan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, sehingga berkemampuan untuk menjawab pertanyaan wawancara terkait kualitas layanan dan responsivitas sebagai indikator untuk mengukur kinerja obyek yang akan diteliti. Adapun daftar narasumber yang dijadikan objek penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.8**  
**Daftar Narasumber Penelitian**

<b>Jabatan Narasumber</b>	<b>Nama Narasumber</b>
Kepala Bidang Pengelolaan Lahan	Budi
Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri	Rusmansyah
Kepala Bidang Perencanaan dan Teknik	Rudy Trisna
Staff Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Karimun	Ismayani
Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Karimun	Renni Yunita
HRD Supervisor PT Tri Megah Perkasa Utama	Jasman
HRD & GA Manager PT Riau Alam Indonesia	Zuchri Lubis
<b>Total</b>	<b>7 orang</b>

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi menurut Rahmawati (dalam Hartadi, 2017) adalah Teknik pengambilan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian didalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

1.9.5. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan mamutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2014). Adapun proses dalam teknik analisa data didalam penelitian ini terdiri dari tiga langkah yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi (Salim, 2006). Teknik reduksi data dilakukan untuk memilih data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga pertanyaan peneliti dapat terjawab dengan baik.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Salim, 2006).

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisa data. Pada penarikan kesimpulan ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh yang telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilah data yang mengarah kepada permasalahan serta menjawab permasalahan yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid (Hartadi, 2017).